

Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Jimly Asshiddiqie

Buku ini diperuntukkan sebagai sumber bacaan bagi kalangan akademisi, mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya mahasiswa yang berada di semester awal untuk mengenal dasar-dasar dan asas-asas hukum, para praktisi di bidang hukum, dan masyarakat yang memiliki ketertarikan untuk mempelajari pengantar hukum di Indonesia dengan segala bentuk Hukum Positif (*Ius Constitutum*) yang berlaku dari masa ke masa. Uraian substansi dalam buku ini disusun sedemikian rupa sehingga dapat dipelajari secara runtut dan terangkum dalam 12 (dua belas) bab yang terdiri dari : pengantar hukum Indonesia (Bab 1), Sejarah Tata Hukum Indonesia (Bab 2), Sistem Hukum (Bab3), Penggolongan Hukum (bab 4), Hukum Adat (Bab 5), Hukum Perdata (Bab 6), Hukum Pidana (Bab 7), Hukum Tata Negara (Bab 8), Hukum Administrasi Negara (Bab 9), Hukum Dagang (Bab 10), Hukum Agraria (Bab 11), dan Hukum Internasional (Bab 12). Dalam konteks pengembangan dimaksud para pengajar setiap mata kuliah harus menggunakan berbagai literature yang sejalan dengan tuntutan kurikulum pendidikan tinggi hukum. Akan tetapi tuntutan tersebut tidaklah mudah terpenuhi,

Where To Download Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Jimly Asshiddiqie

penyebabnya ialah keterbatasan daya beli dan ketersediaan literature itu sendiri. Dalam mata kuliah hukum tata negara khususnya, sesungguhnya telah banyak literature yang terbit akan tetapi dengan mempertimbangkan materi perkuliahan yang akan disampaikan sekaligus memudahkan mahasiswa mendalami pokok-pokok materi yang tersebar dalam berbagai literature itu, penulis terdorong untuk menyusun buku ini sebagai himpunan materi minimal yang bersumber dari berbagai literature yang telah ada sebelumnya. Menyadari betapa luasnya ruang lingkup materi hukum tata negara, penulis menyusun buku ini dalam dua jilid. Pada jilid satu ini yang terdiri dari lima bab akan menentangahkan uraian tentang pendahuluan, asas-asas hukum tata negara, sumber-sumber hukum tata negara, bentuk negara dan sistem pemerintahan serta hak asasi manusia. Sementara pada jilid kedua direncanakan menguraikan antara lain: konstitusi, kelembagaan negara, pemilihan umum, partai politik, otonomi daerah.

Buku ini diberi judul Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan bertujuan untuk memberikan gambaran bahwa hukum pajak itu merupakan hukum yang bersifat cross border law dan multidisipliner sehingga dalam menjelaskan kedudukan dan memahami maksud dari ketentuan hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan

Where To Download Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Jimly Asshiddiqie

perpajakan harus mengaitkannya dengan bidang hukum lain sebagai satu kesatuan dalam sistem tata hukum nasional dan dengan melalui pendekatan ilmu administrasi dan akuntansi. Keterkaitan ilmu hukum dengan ilmu administrasi perpajakan, ilmu akuntansi, keuangan, dan ilmu hukum lainnya merupakan keniscayaan, agar dalam penerapannya menjadi sederhana dan efektif. Penerapan ilmu administrasi, akuntansi, dan ilmu keuangan dilakukan untuk melakukan penelitian dan analisa terhadap keberadaan objek pajak berikut potensinya. Sementara, penerapan ilmu hukum umum lainnya, tidak dilakukan secara serta merta ke dalam hukum pajak, melainkan dengan melakukan penyesuaian dan modifikasi dengan berbagai cara seperti dengan memberikan pengertian, batasan, perluasan, dan pengecualian tersendiri terkait dengan subjek, objek, dan akibat hukum pajak yang sekaligus menjadikan hal-hal tersebut sebagai kekhususan yang berlaku dalam ilmu hukum pajak. Kekhususan tersebut bertujuan untuk menciptakan kesesuaian dengan orientasi ilmu hukum pajak yaitu untuk menjalankan fungsi utamanya yaitu fungsi budgeter dan reguler. Dalam konteks ini, ilmu hukum pajak mempunyai dua aspek, yaitu aspek hukum administrasi perpajakan dan ilmu hukum pajak itu sendiri. Aspek hukum administrasi perpajakan merupakan seperangkat peraturan hukum yang mengatur dan mengikat tentang bagaimana cara melaksanakan

Where To Download Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Jimly Asshiddiqie

hak dan kewajiban administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak dan fiskus beserta hubungan timbal balik keduanya terkait pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka merealisasikan target penerimaan negara dari sektor pajak (realisasi fungsi budgeter). Adapun aspek hukum pajak merupakan seperangkat hukum pajak materiel dan hukum pajak formil yang mengatur dan memberikan hak-hak hukum bagi wajib pajak maupun fiskus sehingga tercipta perlindungan hukum dan keadilan di bidang perpajakan (fungsi reguler). Buku Persembahan Penerbit PrenadaMediaGroup

The fourth edition of Constitutional and Administrative Law: Text with Materials provides a wealth of essential materials drawn from a wide range of sources and integrated with lively commentary. It enables students to gain a full understanding of public law by explaining the context of its historical development and current political climate.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945 dinyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Akibat dari ketentuan ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berdasarkan hukum Penetapan suatu negara sebagai negara hukum yang berkesejahteraan

Where To Download Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Jimly Asshiddiqie

memberikan konsekuensi bahwa hukum yang berlaku akan memberikan jaminan terhadap segenap bangsa, segenap individu dari perlakuan tidak adil dan perbuatan sewenang-wenang. Hukum harus mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya sebagai warga negara dan hak asasi manusianya terjamin. Di mana hal ini hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan tentang “jaminan” tersebut dituangkan dalam konstitusi.

The fall of New Order Regime under President Suharto saw the emergence of Reformasi (Reformation) and the beginning of various institutional and governmental changes done in the pursuit of democracy in Indonesia. Constitutional justice is fundamental to the success of democratic transition in the country. One of the results democratic reform and constitutional changes after Reformasi in 1998 is the establishment of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. The book consists of a selection of papers presented at the Asia-Pacific Research Conference on Social Sciences and Humanities. It contains essays on current legal issues in law and justice, and their role and transformation in a globalizing world. Topics covered include human rights, criminal law, good governance, democracy, foreign investment, and regional integration. The conference focused on Asia and the Pacific, two regions where law has taken an important position in creating and shaping the

Where To Download Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Jimly Asshiddiqie

regional integrations, new legal institutions, and norms. This reconfirms the idea that the legal system is extremely important in the global world. This book provides new insights and new horizons on how law and justice took part in globalizing human interaction, especially in the Asia-Pacific region.

"Dalam buku ini, Penulis mengungkapkan bagaimana pengaturan HAM dalam hukum keadaan darurat dan praktiknya di lapangan, yakni pelanggaran HAM seperti apa yang dibenarkan dalam hukum keadaan darurat dan bagaimana Pemerintah menyelesaikan pelanggaran HAM dalam keadaan darurat tersebut, serta hal-hal baru yang ditemukan dalam penulisan buku ini. Hal-hal baru dimaksud seperti: ""kompensasi"" terhadap korban pelanggaran HAM akibat pemberlakuan status hukum keadaan darurat sebaiknya dipisahkan dengan proses hukum, tetapi cukup dibuktikan oleh tim medis/dokter dari Rumah Sakit yang ditunjuk Pemerintah. Kemudian, bagaimana seharusnya Pemerintah menerapkan pemberlakuan status hukum keadaan darurat yang efektif dan bagaimana seharusnya Hakim HAM mempertimbangkan penerapan pemberlakuan status keadaan darurat itu, semuanya dibahas dalam buku ini. Dalam buku ini, Penulis juga memberanikan diri menganalisis putusan bebas Peninjauan Kembali Mahkamah Agung atas pelanggaran HAM berat Timor-Timur pascajajak pendapat 1999 dan putusan bebas

Where To Download Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Jimly Asshiddiqie

Kasasi Mahkamah Agung atas pelanggaran HAM berat Tanjung Priok 1984. Hal ini dilakukan, mengingat kedua kasus tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijsde*). Akhirnya, dari kajian ilmiah penulisan buku ini, Penulis menganjurkan setiap penyelesaian kasus pelanggaran HAM dalam keadaan darurat, khususnya darurat militer dan perang, lebih baik ditangani secara khusus melalui Pengadilan Militer dengan komposisi hakimnya terdiri atas tiga orang hakim dari peradilan umum dan dua orang dari peradilan militer, ketimbang melalui UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memiliki prinsip-prinsip retroaktif, tidak mengenal kadaluwarsa, dan memerlukan rekomendasi DPR. Adanya prinsip-prinsip yang dianut oleh UU No. 26 Tahun 2000 tersebut menjadikan proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM menjadi panjang dan penuh ketidakpastian. Akibatnya hampir dapat diprediksikan semua kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di-"bebaskan" oleh Pengadilan HAM Ad Hoc karena barang bukti dan saksi korban/kunci yang diajukan ke persidangan telah rusak/hilang atau meninggal dunia."

Substantive Justice International Journal of Law is published on behalf of the Faculty of Law in the Universitas Muslim Indonesia. It is a forum for outstanding original contributions to legal studies,

Where To Download Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Jimly Asshiddiqie

with an emphasis on matters of theory and on broad issues arising from the relationship of law to other disciplines. In addition to traditional questions of legal interest, the following are all within the purview of the journal: comparative and international law, the law of the Republic of Indonesia, legal history and philosophy, and interdisciplinary material that is relevant to legal studies.

The core argument of this book is that citizenship is produced and practiced through movements against injustice. These take the shape of struggles—by people at the grass-roots level and middle classes and their representing organisations and activists—for cultural recognition, social and economic justice, and popular representation. Such popular struggles in Indonesia have largely ended up engaging with the state through both discursive and non-discursive processes. While the state is a common focal point, these struggles are fragmented across different sectors and subject positions. Developing chains of solidarity among fragments of struggles is highly important, yet attempts at bridging fragmentation leave much to be desired. The character and fragmentation of popular struggles reflects the diversity of injustices and subject positions in society, but is also shaped by political dynamics. The struggle for citizenship and the historical development of democracy in Indonesia are closely interwoven. The inability to bridge fragmentation

Where To Download Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Jimly Asshiddiqie

among citizenship struggles mimics pro-democracy movements' lack of capacity in building broader alliances. Likewise, these movements' tendency toward elitism and habit of penetrating the State also characterise current struggles for citizenship. In this situation of multiple injustices, collectivities and mobilisations, it could be argued that democratic representation and politics is the foremost arena for integrating and transforming antagonistic relations within fragmented popular struggles. However, this requires a democracy that not only has sovereign control over public affairs, but also contains robust channels and organisations for political representation. In Indonesia, it is found that formal democracy is underperforming in this respect. It is thus a foremost concern to transform democracy itself, also as a means for transforming structures of injustice in society. The development of transformative agendas, organisations, and strategies remains a continued need and challenge for the realisation of citizenship in contemporary Indonesia.

This volume focuses on the making, nature, and role of the first modern constitutions at the founding of the modern nation-states in Southeast Asia. These historical essays add richly to our understanding and appreciation of the founding moments and to the theory and practice of constitutionalism in these states. This volume makes three significant

Where To Download Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Jimly Asshiddiqie

contributions. First, it helps plug the wide knowledge gap in comparative constitutional history in Southeast Asia. Second, it furthers our understanding of contemporary constitutional practice and also anticipates possible developmental trajectories in light of the foundational values embedded in and manifested through these constitutions. Third, through the comparative historical study of these early constitutions, plausible theoretical insights may be gained to further our understanding of Southeast Asia's constitutional history. The book is essential reading for those wishing to obtain a deeper understanding of the constitutional foundations of Southeast Asia.

On constitutional law in Indonesia after amendment to the Indonesian 1945 Constitution.

Sebagai bangsa yang terus maju dan berkembang, hukum tata negara yang dimiliki oleh Indonesia juga terus berubah mengikuti dinamika di segala bidang. Karena itu, buku ini berupaya memberikan paparan komprehensif mengenai hukum tata negara Indonesia, khususnya pascareformasi yang ditandai dengan amendemen UUD 1945 sejak 1992-2002. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup Buku ini merupakan suatu pengantar (introduction, inleiding) untuk mempelajari hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai suatu pengantar diharapkan dapat membuka jalan dan menimbulkan minat untuk menggali lebih dalam bagi mereka, terutama

Where To Download Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Jimly Asshiddiqie

mahasiswa, yang hendak mulai mempelajari tentang hukum Indonesia, karenanya uraian dalam buku ini cenderung bersifat singkat dan sederhana saja.

Buku Ajar HUKUM TATA NEGARA yang baik sekurangnya memerlukan dua kepakaran, yaitu ahli ilmu politik dan ilmu hukum. Dalam Buku Ajar HUKUM TATA NEGARA ini para pembaca terlebih dahulu diajak untuk mengenali apa itu HUKUM TATA NEGARA sebagaimana diuraikan pada bab pertamanya.

Kemudian, pada bab kedua dikemukakan Konsep Dasar Hukum Tata Negara berisi Pengertian Hukum Tata Negara, Ruang Lingkup Hukum Tata Negara, dan Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Lainnya.

Selanjutnya, pada bab ketiga dikemukakan Sumber Hukum Tata Negara berisi Pengertian dan Kedudukan Sumber Hukum Tata Negara, Macam Macam Sumber Hukum Tata Negara, dan Sumber Hukum Tata Negara menurut Ilmu Hukum Tata Negara. Sedangkan pada bab keempat dikemukakan tentang Sejarah Ketatanegaraan Indonesia berisi Sistem Pemerintahan Indonesia, Masa berlakunya Undang Undang Dasar 1945 Tahap Pertama (18 Agustus 1945- 27 Desember 1949), Masa Berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 17 Agustus 1950), Masa Berlakunya Undang Undang Dasar Sementara (17 Agustus 1950-5 Juli 1959) Masa Berlakunya Undang Undang Dasar 1945 Tahap Kedua (5 Juli 1959), dan Masa Pasca Amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2001). Terakhir, pada bab kelima dikemukakan Lembaga Negara berisi Perkembangan Organisasi Negara dan Pemerintahan, Perkembangan

Where To Download Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Jimly Asshiddiqie

Lembaga Lembaga Independen, Lembaga Lembaga Negara, Trias Politika, dan Sistem Pemerintahan Daerah.

Hukum Tata Negara merupakan cabang dari Ilmu Hukum. Dari segi teori, Hukum Tata Negara (staatrecht) dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu staatrecht in ruimere zin (arti luas), dan staatrecht in engere zin (arti sempit), dimana dalam arti in engere zin inilah Hukum Tata Negara atau verfassungrecht yang dapat dibedakan antara pengertian yang luas dan pengertian yang sempit. Hukum Tata Negara dari segi Istilah biasanya juga dipersamakan dengan istilah law constitutional yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Hukum Konstitusi, walaupun ada juga yang membedakan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi. Hukum Tata Negara juga dapat dipelajari dari segi Hukum Tata Negara positif dan Hukum Tata Negara umum. Hukum Tata Negara positif mempelajari tentang norma-norma dasar yang berlaku di suatu wilayah dan waktu tertentu. Sementara Hukum Tata Negara umum mempelajari segala gejala ilmiah yang berkaitan dengan hukum tata Negara pada umumnya. Hal ini berkaitan pula dengan istilah lehre dan recht pada istilah verfassung yang mengindikasikan bahwa domain akademis Ilmu Hukum Tata Negara sangat luas jangkauan pembahasannya. Buku ini terdiri atas 7 (tujuh) Bab dan dimulai dengan Bab I : Pendahuluan; Bab II : Ilmu Hukum Tata Negara; Bab III : Sumber-sumber Hukum Tata Negara; Bab IV : Konstitusi; Bab V : Lembaga dan Fungsi Kekuasaan Negara; Bab VI : Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan; dan Bab VII :

Where To Download Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Jimly Asshiddiqie

Partai Politik dan Pemilihan Umum.

Pemikiran yang digagas oleh Prof. Dr. Tahir Azhary, S.H, sangat relevan untuk dibicarakan sebagai landasan pemikiran dan filosofis dalam meninjau pola hubungan antara negara, hukum, dan agama, khususnya di Indonesia yang memiliki karakteristik unik sebagai Negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terlebih lagi pasca-1998, arus demokratisasi diikuti dengan semakin berkembangnya proliferasi gerakan Islam. Berbagai permasalahan dan perdebatan kontemporer saat ini, mulai dari wacana pendirian Negara Islam di Indonesia, pengakuan negara terhadap agama dan aliran kepercayaan, berbagai konflik antar umat beragama, proliferasi gerakan radikalisme Islam, penyerangan terhadap penganut agama minoritas hingga munculnya peraturan-peraturan daerah yang bernuansa syariah, dapat dikembalikan kepada pertanyaan mendasar: bagaimana hubungan antara negara, hukum, dan agama dalam konteks Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, namun tidak menganut baik teokrasi maupun sekularisme. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup

e would like to welcome you to the ASIAN CONFERENCE ON HUMANITIES, INDUSTRY, AND TECHNOLOGY FOR SOCIETY hosted by, Dr Soetomo University on 30 - 31 July 2019 at Dr Soetomo University, Surabaya, East Java, Indonesia. The conference aims to provide all researchers with the opportunity to share their research in the areas of Social

Where To Download Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Jimly Asshiddiqie

Science, Industry, & Technology to the International community. This Conference accepts all paper related to Humanities, Industrial Revolution, Applied Technology and Engineering for Sustainable Society and our Objectives is to promote an exchange of research ideas and knowledge among local and international researchers and alsı to provide a platform for research collaborations among local and international researchers and institutions of higher learning.

Buku ini mengurai kembali ruang yang sudah diuraikan dan sebagian belum diuraikan dalam buku-buku Hukum Tata Negara yang ditulis oleh para pendahulu. Tentu sebagai suatu kajian, buku ini dapat dijadikan sebagai buku pegangan bagi mahasiswa, dosen, atau para peneliti dan ahli guna menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ketatanegaraan. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.

Setiap Daerah di Indonesia Mempunyai Pemimpin diantaranya adalah Gubernur, Bupati dan wali kota. Untuk memilih pemimpin tersebut maka pemerintah pusat melaksanakan pemilihan yang dilakukan oleh rakyat dalam satu daerah. Pemilihan ini biasa disebut sebagai PILKADA. Pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut PILKADA atau Pemilukada dilakukan oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang antara lain Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta Wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Sejak pertama kali melaksanakan demokrasi,

Where To Download Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Jimly Asshiddiqie

pemilihan kepala daerah tidak dilakukam langsung oleh rakyat melainkan oleh DPRD, baru Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada yang pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Hukum administrasi negara telah berkembang sejalan dengan gerak pemerintah mulai menata masyarakat. Dalam kaitan itu pemerintah menggunakan sarana hukum sebagai instrumen pengaturan. Sebagai perwujudannya, pemerintah mengeluarkan / melaksanakan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, dan keputusan-keputusan yang mengandung suatu larangan maupun berupa kebolehan (izin). Oleh karna itu, sejak awal, bahkan, sejak dahulu kala pemerintah telah terlibat atau telah menggunakan sarana hukum dalam penataan dan pengelolaan masyarakat. Dengan berkembangnya kehidupan masyarakat menyebabkan pula berkembangnya tugas-tugas pemerintahan yang dapat di lihat pada berbagai bidang urusan pemerintahan telah terjadi penumpukan aturan-aturan dan keputusan-keputusan pemerintah yang saling melengkapi, bahkan dapat pula bersifat mengubah karna terjadinya perubahan situasi dan kondisi dalam masyarakat. Pengantar Hukum Indonesia (PHI) merupakan bagian dari Pengantar Ilmu Hukum (PIH) karena merupakan bagian kecil dari ilmu hukum di dunia. Akan tetapi, keduanya memiliki relevansi atau hubungan yang signifikan karena memiliki objek yang sama, yaitu hukum. Adapun buku ini pada

Where To Download Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Jimly Asshiddiqie

prinsipnya menyuguhkan pelbagai materi terkait mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia sehingga diharapkan dapat membantu para mahasiswa untuk memahami tata hukum di Indonesia dengan segenap seluk-beluknya. Materi buku ini berisikan mengenai konsep dasar hukum dan sistem hukum, Sejarah Hukum, Hukum Islam, Penggolongan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan sebagainya. Buku ini dapat dibaca oleh para mahasiswa fakultas hukum, mahasiswa fakultas syariah, pengajar, para peneliti, pengamat, dan praktisi hukum.

This book critically evaluates different models of judicial leadership in Indonesia to examine the impact that individual chief justices can have on the development of constitutional courts. It explores the importance of this leadership as a factor explaining the dynamic of judicial power. Drawing on an Aristotelean model of heroism and the established idea of judicial heroes to explore the types of leadership that judges can exercise, it illustrates how Indonesia's recent experience offers a stark contrast between the different models. First, a prudential-minimalist heroic chief justice who knows how to enhance the Court's authority while fortifying the Court's status by playing a minimalist role in policy areas. Second, a bold and aggressive heroic chief justice, employing an ambitious constitutional interpretation. The third model is a soldier-type chief justice, who portrays himself as a subordinate of the Executive and Legislature. Contrary perhaps to expectations, the book's findings show a more cautious initial approach to be the most effective. The experience of Indonesia clearly illustrates the importance of heroic judicial leadership and how the approach chosen by a court can have serious consequences for its success. This

Where To Download Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Jimly Asshiddiqie

book will be a valuable resource for those interested in the law and politics of Indonesia, comparative constitutional law, and comparative judicial politics.

Supremasi hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Usaha Negara, dimaksudkan agar penyelenggara (administrasi) negara dan para penegak hukum tidak mengabaikan ide dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sebab, salah satu faktor utama keterpurukan proses hukum dan peradilan di Indonesia disebabkan oleh pelaksanaan hukum dan penegakan hukum yang acap kali mengabaikan rasa keadilan masyarakat, dan hanya terpaku pada formalitas dan , prosedur hukum semata. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup

This book examines the presence of ethnic, religious, political, and ideational pluralities in Southeast Asian societies and how their respective constitutions respond to these pluralities. Countries covered in this book are Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. The chapters examine: first, the range of pluralist constitutional values and ideas embodied in the constitutions; secondly, the pluralist sources of constitutional norms; thirdly, the design of constitutional structures responding to various pluralities; and fourthly, the construction and interpretation of bills of rights in response to existing pluralities. The 'pluralist constitution' is thus one that recognises internal pluralities within society and makes arrangements to accommodate, rather than eliminate, these pluralities.

On constitutional law of Indonesia after amendments to the Indonesian 1945 Constitution in 1999-2002.

A starting point for the study of the English Constitution and comparative constitutional law, *The Law of the Constitution* elucidates the guiding principles of the modern constitution of England: the legislative sovereignty of Parliament, the rule of

Where To Download Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Jimly Asshiddiqie

law, and the binding force of unwritten conventions.

Praktik penyelenggaraan pemerintahan pemerintah yang memegang semua kendali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun kini, paradigma penyelenggaraan pemerintahan seperti ini telah mengalami perubahan mendasar. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup

Buku Hukum Administrasi Negara yang kita sajikan memiliki kelebihan dibandingkan dengan buku hukum administrasi negara yang ada sekarang karena membahas tentang hukum administrasi negara menurut UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan serta membandingkan dengan undang-undang yang terdahulu. Kelebihan laen di dalam UU No 30 Tahun 2014 tersebut adalah penggunaan simbol “Citizen Friendly” dalam suatu produk aturan perundangan tersebut yang merupakan prototype baru dalam sejarah perjalanan peraturan perundangan dalam kehidupan berbangsa khususnya Dalam Simbolisasi Administrasi Pemerintahan di Indonesia. Dengan simbol itu suatu tata nilai baru akan dijunjung tinggi dan akan dijadikan dasar evaluasi dalam perjalanannya. Menarik untuk dicermati dan ditelusuri kenapa simbolisasi tersebut sampai tercantum dalam produk hukum dan baru kali ini tercantum dalam aturan perundangan di Indonesia. Rumusan tersebut tercantum secara eksplisit pada bagian penjelasan umum undang-undang nomor 30 tahun 2014. Legislator Undang-undang ini terkesan ingin

Where To Download Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Jimly Asshiddiqie

membangun image baru dan pesan baru yang sengaja dikobarkan lewat simbol itu. Yakni kesan dan pesan baru tentang administrasi pemerintahan yang “ramah” serta sifat kesamaan kedudukan antara “penguasa” dengan “yang dikuasai”. Citizen Friendly dalam bidang administrasi, biasa dikaitkan dengan reformasi birokrasi, yang dikaitkan dengan bagaimana membangun administrasi pemerintahan yang ramah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pesan yang lain terdapat keinginan berubah secara mendasar tentang administrasi pemerintahan di Indonesia, yang semula cenderung lebih menonjolkan faktor otoritas formal dari sebuah kekuasaan, berubah menuju administrasi pemerintahan yang ramah, dengan mendasarkan pada kemampuan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, dengan mendasarkan pada azas bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Diharapkan buku ini dapat menjadi bahan acuan bagi semua pihak, khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum untuk mengenal dan mengetahui tentang perkembangan terbaru hukum administrasi negara menurut UU No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Buku Hukum Administrasi Negara (HAN) Sektorial bertujuan guna memenuhi kebutuhan perkuliahan mata kuliah Hukum Administrasi Negara Sektorial di Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Where To Download Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Jimly Asshiddiqie

Buku teks ini antara lain memuat bahasan: Konsep dan pengertiandasar tata ruang dan penataan ruang. Dasar pemikiran, asas, dan tujuan penataan ruang. Fenomena dan klasifikasi tata ruang: alam dan buatan manusia, faktor ekonomi dan sosial budaya, kriteria penataan ruang, pembentukan dan peruntukan. Fungsi dan eksistensi tata ruang dalam PPLH. Tata ruang sebagai instrumen yuridis dalam PPLH. Dasar dan sumber hukum penataan ruang. Aspek dan pendekatan penataan ruang.

Kewenangan pemerintah, kebijaksanaan dan strategi penataan ruang. Rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN). Kebijakan penataan ruang dalam RPJMN. Tata ruang dan implikasinya. Hak dan kewajiban (masyarakat) dalam penataan ruang. Buku persembahkan penerbit Prenada Media -Prenada Media-

Hukum Administrasi Negara disajikan guna memperkaya referensi hukum administrasi negara, yang sangat disayangkan, masih minim tersedia. Dewasa ini dapat dilihat semua bidang kehidupan masyarakat sudah terjamah aspek hukum, khususnya dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh penyelenggara negara kepada masyarakat. Karenanya, sangat krusial untuk mempelajari dan memahami hukum administrasi yang berlaku, sehingga dapat terwujud upaya penyelenggara pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Buku

Where To Download Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Jimly Asshiddiqie

ini sejatinya merupakan buku ajar pada matakuliah hukum administrasi negara, terutama pada Fakultas Hukum, FISIP, dan Fakultas Syariah. Karenanya, materi di dalamnya telah disesuaikan dengan kebutuhan perkuliahan. Mahasiswa akan disuguhkan materi yang amat mendasar tentang hukum di bab pertama, disusul dengan materi negara hukum, hukum administrasi negara dan berbagai teorinya, hukum kepegawaian, wewenang, serta tindakan pemerintah. Pentingnya good governance, perlindungan dan penegakan hukum administrasi negara, lembaga Negara Republik Indonesia, serta sanksi administrasi juga termasuk dalam materi yang diajarkan. Tidak ketinggalan, penulis juga membahas hukum pemerintah daerah di akhir buku. Buku ini dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya, terutama mahasiswa Fakultas Hukum, baik strata I, II, dan III. Kehadiran buku ini akan bermanfaat dan menambah wacana hukum ketenagakerjaan di Indonesia serta menambah wawasan para pembaca yang mempelajari hukum administrasi negara. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup

Buku ini semula dibuat dalam bentuk buku ajar matakuliah Pengantar Hukum Indonesia, tidak lama setelah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) diubah (amendemen) pada paruh awal tahun 2000. Membahas berbagai persoalan ketika hukum sudah

Where To Download Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Jimly Asshiddiqie

dibahas dari berbagai bidang hukum seperti Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Internasional. Singkatnya, melalui buku ini siapa pun yang ingin belajar dan memahami berbagai persoalan dan sendi-sendinya diperkenalkan dengan cara yang ringkas dan menarik. Membaca buku ini, kita akan diingatkan pada dua referensi hukum yang terkenal, yang menjadi acuan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI) dan berbagai Fakultas Hukum di Indonesia, berjudul: Perihal Kaedah Hukum dan Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum (1979), buku yang ditulis oleh Prof. Purnadi Purbacaraka dan Prof Soerjono Soekanto itu sangat menarik di kalangan mahasiswa FH-UI karena banyak membuka wawasan dan memberikan pengetahuan mendasar tentang hukum itu apa dan berbagai bidang hukum, dengan cara yang sangat menarik. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group. Hukum akan selalu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Tanpa adanya hukum, manusia yang merupakan makhluk sosial tidak bisa selalu hidup berdampingan, bersosialisasi, dan berkomunikasi secara tertib dan teratur. Hal ini disebabkan hukum adalah alat yang berfungsi untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 1 ayat 3 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Atas dasar tersebut, maka seluruh aspek kehidupan

Where To Download Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Jimly Asshiddiqie

dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus selalu berlandaskan kepada hukum. Untuk menjamin keamanan dan keteraturan hidup bermasyarakat di Indonesia, maka seluruh rakyat wajib untuk menaati peraturan hukum yang didasarkan pada suatu sistem hukum yang berlaku. Buku ini akan memberikan informasi yang lengkap untuk lebih memahami sistem hukum Indonesia, baik dari segi sejarah, tujuan, unsur, dan jenisnya. Buku ini juga memberikan informasi pengantar mengenai hukum internasional. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya memiliki ciri lokal, namun juga mengakomodasi prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Tidak hanya sebagai pedoman dalam menempuh pendidikan, lebih jauh lagi buku ini diharapkan dapat mengajak seluruh pembaca untuk meningkatkan kesadaran hukum kita sebagai masyarakat intelektual Indonesia. Atas kesempatan dan perhatian yang diberikan untuk membaca serta memahami buku ini, penulis mengucapkan terimakasih. Hukum akan selalu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Tanpa adanya hukum, manusia yang merupakan makhluk sosial tidak bisa selalu hidup berdampingan, bersosialisasi, dan berkomunikasi secara tertib dan teratur. Hal ini disebabkan hukum adalah alat yang berfungsi untuk mengatur perilaku

Where To Download Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi Jimly Asshiddiqie

manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 1 ayat 3 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Atas dasar tersebut, maka seluruh aspek kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus selalu berlandaskan kepada hukum. Untuk menjamin keamanan dan keteraturan hidup bermasyarakat di Indonesia, maka seluruh rakyat wajib untuk menaati peraturan hukum yang didasarkan pada suatu sistem hukum yang berlaku. Buku ini akan memberikan informasi yang lengkap untuk lebih memahami sistem hukum Indonesia, baik dari segi sejarah, tujuan, unsur, dan jenisnya. Buku ini juga memberikan informasi pengantar mengenai hukum internasional. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya memiliki ciri lokal, namun juga mengakomodasi prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Tidak hanya sebagai pedoman dalam menempuh pendidikan, lebih jauh lagi buku ini diharapkan dapat mengajak seluruh pembaca untuk meningkatkan kesadaran hukum kita sebagai masyarakat intelektual Indonesia. Atas kesempatan dan perhatian yang diberikan untuk membaca serta memahami buku ini, penulis mengucapkan terimakasih.

Book cahpter ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-

